

Tri Wahyu R.

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

The problem of poverty was crucial for all countries on the world. The data of poverty is very important to support strategies for decreasing poverty and will be instrument by policy maker. In other, the data of poverty and the poor can be using to formulating policy and get to target of policy. All of strategy was goal of improving welfare.

Keywords: poverty and the poor

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi "berkah tersembunyi" (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap keiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin.

KAJIAN LITERATUR TENTANG KEMISKINAN

Mengidentifikasi adanya kemiskinan ada tiga cara yaitu : tolok ukur, ciri-ciri, dan sebab-sebab (penyebabnya).

Kemiskinan Dilihat Dengan Tolok Ukur

a). Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluarannya. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita".

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998). Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

b). Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum, kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut "tetap (tidak berubah)" dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum.

Kemiskinan Dilihat Ciri-cirinya

Beberapa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu :

- a. Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap
- c. Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan
- d. Tidak memiliki tempat tinggal
- e. Tidak terpenuhinya standar gizi minimal

Kemiskinan Dilihat Dari Penyebabnya

a). Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan (Soetandyo, 1995). Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

b). Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan (Suyanto, 1995). Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan menurut BKKBN

BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III) dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu :

- 1). Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
- 2). Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3). Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, -sekolah, bekerja dan bepergian.
- 4). Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
- 5). Bila anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator tersebut di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep Keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam dan belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

Kemiskinan Menurut BPS

Pada tahun 2000 BPS melakukan studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumahtangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual. Dari hasil SPKPM 2000, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumahtangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan.

Tabel. 1. Delapan Variabel hasil SPKPM 2000

| No | Variabel | Skor | |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Skor 1 | Skor 0 |
| 1 | Luas lantai per kapita | < = 8 m ² | > 8 m ² |
| 2 | Jenis lantai | Tanah | Bukan tanah |
| 3 | Air Minum/Ketersediaan air bersih | Air hujan/sumur tidak terlindung | Ledeng/PAM/sumur terlindung |
| 4 | Jenis jamban/WC | Tidak ada | Bersama/Sendiri |
| 5 | Kepemilikan Asset | Tidak punya asset | Punya asset |
| 6 | Pendapatan (total pendapatan per bulan) | < = Rp.350.000,0 | > Rp.350.000,0 |
| 7 | Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) | 80 persen + | < 80 persen |
| 8 | Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) | Tidak ada/ ada, tapi tidak bervariasi | Ada, bervariasi |

Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.17.

Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :

- 1). *Head Count Index* (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- 2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap index- P₁*), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- 3). Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity Index-P₂*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ukuran tingkat kemiskinan, dirumuskan (Foster-Greer-Thorbecke, 1984):

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- a = 0, 1, 2
- z = Garis Kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q), y_i < z
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = jumlah penduduk

Jika $a=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $a=1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P_1) dan jika $a=2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P_2).

MASALAH KEMISKINAN

Masalah kemiskinan sebagai persoalan yang sangat asasi, tumbuh dan berkembang seusia umat manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa masalah kemiskinan itu disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan agama.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996 - 2007 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000 - 2005 (Tabel. 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta orang pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta orang pada tahun 1999. Sementara itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta orang, yaitu dari 47,97 juta orang pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta orang pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada periode yang sama.

Sekalipun sudah ada penurunan tetapi jumlahnya masih merupakan isu nasional, yaitu 13,56 juta orang penduduk miskin di perkotaan dan 23,61 juta orang penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2007.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah 1996 - 2007

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (juta) | | | Persentase Penduduk Miskin | | |
|-------|-------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|-----------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 1996 | 9,42 | 24,59 | 34,01 | 13,39 | 19,78 | 17,47 |
| 1998 | 17,60 | 31,90 | 49,50 | 21,92 | 25,72 | 24,23 |
| 1999 | 15,64 | 32,33 | 47,97 | 19,41 | 26,03 | 23,43 |
| 2000 | 12,30 | 26,40 | 38,70 | 14,60 | 22,38 | 19,14 |
| 2001 | 8,60 | 29,30 | 37,90 | 9,76 | 24,84 | 18,41 |
| 2002 | 13,30 | 25,10 | 38,40 | 14,46 | 21,10 | 18,20 |
| 2003 | 12,20 | 25,10 | 37,30 | 13,57 | 20,23 | 17,42 |
| 2004 | 11,40 | 24,80 | 36,10 | 12,13 | 20,11 | 16,66 |
| 2005 | 12,40 | 22,70 | 35,10 | 11,68 | 19,98 | 15,97 |
| 2006 | 14,49 | 24,81 | 39,30 | 13,47 | 21,81 | 17,75 |
| 2007 | 13,56 | 23,61 | 37,17 | 12,52 | 20,37 | 16,58 |

Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.42.

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2006 – Maret 2007

| Tahun | Kota | Desa | Kota+Desa |
|------------------------------------|------|------|-----------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | | | |
| - Maret 2006 | 2,61 | 4,22 | 3,43 |
| - Maret 2007 | 2,15 | 3,78 | 2,99 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | | | |
| - Maret 2006 | 0,77 | 1,22 | 1,00 |
| - Maret 2007 | 0,57 | 1,09 | 0,84 |

Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.47.

Berdasarkan Tabel 3, pada periode Maret 2006 – Maret 2007, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih parah dari pada perkotaan.

Tabel 4. Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 1996 – 2007

| Tahun | Gini Rasio | | |
|-------|------------|-------|-----------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 1996 | 0,362 | 0,274 | 0,356 |
| 1999 | 0,326 | 0,244 | 0,311 |
| 2002 | 0,330 | 0,290 | 0,329 |
| 2005 | 0,338 | 0,264 | 0,343 |
| 2006 | 0,350 | 0,276 | 0,357 |
| 2007 | 0,374 | 0,302 | 0,376 |

Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.53

Secara umum angka Gini Rasio pada periode 1996 – 2007 di Indonesia berfluktuasi. Angka Gini Rasio ada kecenderungan menurun pada periode 1996-1999 namun kembali meningkat pada periode 1999-2007. Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada periode 1996-1999 terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk sedangkan pada periode 1999-2007 justru distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin buruk (Tabel 4).

Dilihat menurut daerah angka Gini Rasio, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Pola perubahan distribusi pengeluaran penduduk di perkotaan

dan perdesaan tidak selalu linier. Terlihat pada Tabel 4 bahwa angka Gini Rasio pada periode 2002-2005 di perkotaan meningkat sementara di perdesaan justru menurun.

Hal-hal yang menyebabkan tetap menjadi miskin karena faktor-faktor yang melekat pada individu. Faktor-faktor yang melekat individu, seperti cepat merasa puas, sikap menerima segala sesuatu apa adanya tanpa usaha keras dan kurangnya etos kerja. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu struktur masyarakat dan kondisi daerah, seperti golongan petani yang tidak punya tanah, hidupnya sebagai penggarap serta nelayan yang tergantung dari orang-orang kota yang menguasai bahan bakunya dan sekaligus pemasaran hasil usahanya.

UPAYA MEMERANGI KEMISKINAN

Upaya memerangi kemiskinan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah. Upaya tersebut dengan menggunakan strategi yang diarahkan untuk membantu individu, keluarga dan kelompok keluarga yang mengalami masalah kemiskinan agar terentaskan ke tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak serta sekaligus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Ada beberapa langkah yang dipersiapkan untuk memerangi masalah kemiskinan, dengan melalui pendekatan karakteristik penduduk miskin, sebagai berikut :

Karakteristik Sosial Demografi

- a). Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan

Dengan landasan keimanan dan ketaqwaan, maka akan memperoleh suatu keberkahan dan rahmat. Sehingga akan dapat terhindar dari keputus-asaan dan selalu bersikap sabar dalam menghadapi cobaan serta berpendirian teguh.

- b). Melakukan pemerataan akan sumber daya dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh masyarakat

Dengan melihat *Head Count Index* yang dalam tulisan ini diwakili Tabel 4, dimana tingkat ketimpangan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dari pada daerah perdesaan, maka sebagaimana yang ditawarkan oleh kelompok Neoklasik dengan keyakinan tentang adanya "*trickle - down effect*". Hal ini karena ada pendapat bahwa ketimpangan disebabkan oleh rasio harga yang tidak sesuai dengan sasaran pemerataan, penyesuaiannya melalui harga relatif. Sehingga resep dari Neoklasik lebih dikenal dengan istilah "*The Price is Right*". Dengan kebijakan tersebut diyakini bahwa negara akan mengalami pertumbuhan, yang didahului dengan pertumbuhan di masyarakat tingkat bawah di suluh wilayah.

- c). Meningkatkan pendayagunaan lembaga sosial

Kemiskinan harus diberantas dengan suatu sistem ekonomi, maka keberadaan lembaga sosial (seperti lembaga zakat) sebagai alternatif terbaik dengan essensi utama untuk mengurangi kemiskinan. Karena keberadaan lembaga-lembaga sosial tersebut diharapkan akan mampu

menggalang persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandasi sikap saling menghormati dan saling tolong menolong terhadap sesama.

Karakteristik Pendidikan

a). Mengembangkan sumber daya manusia

Dalam usaha memerangi kemiskinan lebih diorientasikan pada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, diantaranya melalui pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk miskin.

Berdasarkan studi yang dilakukan BPS (2007) diketahui bahwa kepala rumahtangga miskin yang tergolong buta huruf sebesar 21,78 persen, sedangkan pada rumahtangga tidak miskin hanya 9,80 persen. Diketahui juga persentase kepala rumahtangga miskin yang buta huruf terhadap jumlah rumahtangga yang buta huruf sebesar 27,38 persen (BPS, 2007).

b). Memberi peluang berusaha/berorganisasi

Memberikan peluang untuk terbentuknya lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi untuk memberdayakan kemampuan yang dimiliki masyarakat terutama penduduk miskin.

Karakteristik Ketenagakerjaan

a). Meningkatkan etos kerja yang tinggi

Dengan bekerja secara disiplin dan tanggung jawab, maka dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

b). Memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin.

Strategi yang ditawarkan oleh Bank Dunia yaitu berupa kebijakan melakukan pemerataan bersamaan dengan pertumbuhan. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin.

Karakteristik Tempat tinggal

a). Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi yang pernah ditawarkan oleh *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 1976, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini alokasi pendapatan pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi secara langsung kebutuhan dasar manusia sehingga tercapai kesejahteraan penduduk miskin.

b). Pendekatan lokasi

Dengan cara pemerintah menanamkan investasinya ke proyek-proyek pembangunan yang diarahkan ke daerah perdesaan, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal.

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM RANGKA UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN

Sebagai pelaksanaan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Musrenbangnas adalah forum evaluasi paruh waktu dari pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Sasaran Musrenbangnas adalah memfasilitasi terjadinya dialog yang terbuka antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbangnas 2008 adalah : *pertama*, penyempurnaan Rancangan RKP Tahun 2009 menjadi Rancangan Akhir RKP Tahun 2009 ; *kedua*, sinkronisasi dan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja menjadi Rancangan Akhir Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) 2009 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKP 2008, serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai hasil kesepakatan Musrenbang provinsi ; *ketiga*, sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2009 ; *keempat*, koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) maupun kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ; *kelima*, pengembangan dan penguatan proses partisipasi dalam penyusunan RKP Tahun 2008 ; *keenam*, pengembangan dan penguatan mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safeguarding*) terhadap pelaksanaan RKP tahun 2008 dan rencana pelaksanaan RKP tahun 2009.

Judul/Tema diatas dijabarkan ke dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional di tahun 2009 sbb :

- 1). Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.
- 2). Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.
- 3). Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Pemantapan Keamanan dan Demokrasi.

Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bersifat realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional 2004-2009.

Sebagai rujukan dalam penjabaran program dan kegiatan prioritas perlu memperhitungkan 7 (tujuh) butir pengarusutamaan, yaitu : partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, desentralisasi otonomi daerah , serta padat karya.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : menjaga stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta pengamanan APBN 2009 melalui pengendalian subsidi dan penyusunan rencana kontijensi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2007, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta
- BPS, Bappenas dan UNDP, 2001, *Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*, Jakarta, BPS, Bappenas, UNDP.
- Bagong Suyanto, 1995, *Perangkap Kemiskinan : Problem & Startegi Pengentasannya*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan*.
- Ravallion, Martin, 1998, *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*, *World Bank : Working Paper No.13*.
- Ritinga, Hamonangan dan Betke, Friedhelm, 2002, *Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat Yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya*, Jakarta, BPS.
- Widodo, Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.